

# PROBLEMATIKA KURIKULUM GENERIK PELAJARAN BAHASA BALI

*by* Nengah Arnawa

---

**Submission date:** 28-Sep-2019 06:37PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1182001639

**File name:** ROBLEMATIKA\_KURIKULUM\_GENERIK\_PELAJARAN\_BAHASA\_BALI-min\_2\_1.pdf (70.36K)

**Word count:** 2298

**Character count:** 13975

## **PROBLEMATIKA KURIKULUM GENERIK PELAJARAN BAHASA BALI**

1 Nengah Arnawa  
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali  
nengah.arnawa65@gmail.com

### **ABSTRAK**

Makalah ini ditulis untuk menunjukkan bahwa ada masalah mendasar pada pembelajaran bahasa Bali, yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 20/2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1/2018. Berdasarkan peraturan itu, bahasa Bali wajib diajarkan pada semua jenis dan jenjang sekolah. Namun, tuntutan peraturan itu paradoks dengan potret kurikulum pembelajaran bahasa Bali sebagai pedoman dasar pelaksanaannya. Salah satu indikator keparadoksan itu dapat dilihat dari sasaran kompetensi dalam kurikulum yang sangat generik sehingga mengabaikan kebutuhan khusus pembelajaran bahasa Bali. Kondisi empirik ini tidak sesuai dengan logika filsafat epistemologi-induktif. Spesifikasi cakupan kompetensi dalam kurikulum dan silabus pembelajaran bahasa Bali mutlak dilakukan karena kebutuhan pembelajaran bahasa tidak sama pada semua jejang dan jenis sekolah. Kebutuhan Pembelajaran bahasa Bali pada madrasah pasti berbeda dengan sekolah umum pada jenjangnya. Kebutuhan pembelajaran bahasa Bali di SMA seharusnya berbeda dengan SMK; bahkan antara rumpun SMK pun membutuhkan sub-spesifikasi. Demikian pula, pembelajaran bahasa Bali pada masing-masing jenjang dan jenis SLB juga membutuhkan spesifikasi. Peserta didik tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita, yang memiliki keterbatasan masing-masing, seharusnya kepadanya dipajankan bahan ajar bahasa Bali yang sesuai kebutuhannya. Hal yang sama pun terjadi pada pendidikan paket A, B, dan C yang peserta didiknya memiliki umur di atas rata-rata usia sekolah. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum pembelajaran bahasa Bali perlu didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan pembelajaran pada masing-masing jenis dan jenjang sekolah.

Kata kunci : kurikulum, kompetensi, kebutuhan pembelajaran

### **ABSTRACT**

This paper is written to show that there are fundamental problems in learning Balinese, whose implementation is based on Bali Governor Regulation Number 20/2013 and Bali Regional Regulation Number 1/2018. Based on both regulations, Balinese

must be taught to all types and levels of schools. However, the regulatory demands are paradox with a portrait of the Balinese learning curriculum as a basic guideline for its implementation. One indicator of paradoxical can be seen from the competency target in curriculum is very generic so that it ignores the special needs of Balinese learning. This empirical condition does not conform to the logic of inductive-epistemological philosophy. The scope of competence specification in the curriculum and syllabus of Balinese learning is necessary because the need for language learning is not the same in all levels and types of schools. The needs of Balinese learning at the Madrasah definitely be different from general schools at the same level. The need of Balinese learning in general high school differs from vocational high school; even between kinds of the vocational high school also need sub-specifications. Similarly, learning Balinese at each level and type of SLB also requires specifications. Students who are blind, deaf, and mentally disabled, should be exposed to Balinese teaching materials that their needs. The same thing happened to the education of packages A, B, and C whose students had an age above the school age average. Therefore, the planning of the Balinese learning curriculum must be based on competencies and learning needs in each type and level of school.

*Keywords: curriculum, competence, learning needs.*

## 1. Pendahuluan

Pelajaran bahasa Bali merupakan muatan lokal wajib bagi semua jenis dan jenjang sekolah di seluruh Provinsi Bali (Perda No. 1/2018 pasal 1.6; pasal 4.e; pasal 11.a). Pengajaran bahasa Bali pun dipandang sebagai salah satu strategi perlindungan dan pembinaannya (pasal 7.a dan pasal 10.a Perda No.1/2018). Mengacu pada peraturan daerah itu, pembelajaran bahasa Bali dapat dipetakan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Peta Pembelajaran Bahasa Bali

Jenjang Jenis	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah Pertama	Pendidikan Menengah Atas
Umum	SD	SMP	SMA
Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah / MAK
SLB	10 SLB SD A, B, C, D, E, G	SLB SMP A, B, C, D, E, G	SLB SMA A, B, C, D, E, G
Kejuruan			SMK (Berbagai Rumpun)
Non-Formal	Paket A	Paket B	Paket C

Keterangan: SLB A = tunanetra                      SLB D = tunadaksa  
                   SLB B = tunarungu                    SLB E = tunalaras  
                   SLB C = tunagrahita                    SLB G = tunaganda

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa ada banyak variabel pembeda yang wajib dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau tujuan pembelajaran bahasa Bali pada semua jenjang dan jenis sekolah. Variabel-variabel pembeda tersebut menjadi kekhususan dan karakteristik pembelajaran bahasa Bali pada masing-masing jenjang dan jenis sekolah; misalnya, program pendidikan paket A yang setara dengan SD. Perbedaan mencolok antara program pendidikan paket A dengan SD terletak pada variabel usia peserta didiknya. Peserta didik pada program paket A adalah mereka yang telah melampaui batas usia wajib belajar Sekolah Dasar. Perbedaan usia ini berpengaruh terhadap kebutuhan pembelajaran bahasa Bali. Menurut Piaget (1969), Sund (1976), dan Chaer (2003) bahwa tingkat kognitif seseorang, yang memiliki perkembangan normal, akan linier dengan pertambahan usianya. Selanjutnya, perkembangan kognitif menjadi *intake* bagi pembelajaran bahasa Bali sehingga seleksi materi ajar mengikuti formula  $i + 1$ , yang artinya satu tingkat di atas kompetensi yang telah dimiliki pembelajar (Baradja, 1990; Tolla, 1990). Mengacu pada fase perkembangan kognitif dan prinsip formulasi bahan ajar itu, perlu didesain standar kompetensi dalam silabus pembelajaran bahasa Bali yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Atas prinsip ini, sangat tidak masuk akal jika peserta didik baru pada program paket A diajarkan pengenalan anggota tubuh (misalnya, melalui materi ajar *kosabasa* Bali) seperti yang tertuang pada kompetensi dasar 2.1 pelajaran bahasa Bali untuk kelas I SD (Lampiran Pergub No. 20/2013). Contoh persoalan lain adalah ketidakterdediaan aksara Bali dalam sistem *braille* sehingga tidak mungkin mengajarkan aksara Bali di SLB A pada semua jenjang. Oleh karena itu, diperlukan desain isi pelajaran bahasa Bali yang sesuai dengan karakteristik jenis dan jenjang pendidikan.

## 1. Metode

Makalah ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*). Sumber data berupa dokumen Pemerintah Provinsi Bali, yakni: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 beserta lampirannya yang memuat standar kompetensi pembelajaran bahasa Bali pada semua jenis dan jenjang sekolah. Data dikumpulkan melalui pencatatan dokumen. Data dielisisasi sesuai tujuan penulisan sehingga menghasilkan data utama. Data utama ditriangulasi melalui wawancara tidak terstruktur dengan akademisi, pemerhati, dan praktisi pengajaran bahasa Bali. Data utama dianalisis secara kualitatif (Bungin, 2003) serta hasilnya disajikan secara informal (Sudaryanto, 1993).

## 2. Pembahasan

### 2.1 Problematika Yuridis Pendidikan Bahasa Bali

Pelaksanaan pendidikan bahasa Bali didasarkan pada pasal 32 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bahasa daerah wajib dihormati dan dipelihara oleh negara. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pun diatur penggunaan bahasa daerah untuk mendampingi penggunaan bahasa Indonesia. Selain kedua landasan hukum yang berlaku secara nasional itu, masih ada dua



produk hukum lokal oleh Pemerintah Provinsi Bali yang mengatur pendidikan bahasa Bali, yakni: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013. Dalam batang tubuh Perda itu ditemukan sejumlah pasal yang memiliki kaitan secara eksplisit dengan pendidikan bahasa Bali. Pada pasal 1 (6), bahasa Bali ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib. Pada pasal 4 (e), dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bahasa Bali pada semua jalur dan jenjang pendidikan merupakan salah satu sasaran pemajuan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Pada pasal 7 (3.a) ditegaskan bahwa pendidikan bahasa Bali merupakan salah satu upaya perlindungan. Pada pasal 8 (e) diatur penggunaan bahasa Bali sebagai pengantar dalam pendidikan. Pada pasal 10 (2.a) ditegaskan bahwa pembinaan bahasa Bali dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Pada pasal 11 (1.a, c, d) diatur tentang alokasi waktu wajib minimal untuk pelajaran bahasa Bali, pengadaan guru, dan penyediaan bahan ajar. Mencermati pasal demi pasal tersebut kegigihan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali patut diapresiasi.

Landasan yuridis lain yang gayut dengan pendidikan bahasa Bali adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013. Peraturan Gubernur itu merupakan sikap dan jawaban Pemerintah Provinsi Bali atas kegelisahan masyarakat Bali terhadap eksistensi pelajaran bahasa Bali dalam Kurikulum 2013. Pada pasal 2 (1) dan pasal 4 (1, 2a.b) secara eksplisit ditegaskan bahwa bahasa, aksara, dan sastra Bali wajib diajarkan minimal 2 jam/minggu pada: SD/MI/SDLB/Paket-A, SMP/MTs/SMPLB/Paket-B, dan SMA/MA/SMALB/Paket-C/SMK. Selanjutnya, pada pasal 4 (3) ditegaskan bahwa pengajaran bahasa Bali berbasis kompetensi. Kompetensi pelajaran bahasa Bali dideskripsikan pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pergub tersebut. Mencermati lampiran Pergub Bali Nomor 20/2013 tanggal 23 April 2013 itu ternyata bahwa deskripsi kompetensi pelajaran bahasa Bali hanya memuat kebutuhan pembelajaran untuk sekolah umum, seperti SD, SMP, dan SMA; sedangkan sekolah yang memiliki karakteristik khusus, seperti: madrasah, SLB, SMK, dan paket belajar belum tersentuh. Penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan mengembangkan kompetensi dan untuk mencapai tujuan khusus pula, dalam hal ini berlaku logika filsafat epistemologi-induktif, bahwa semakin khusus sesuatu semakin bernilai suatu itu (Sumarsono, 2004).

Kesenjangan yuridis ini membawa posisi guru bahasa Bali pada pada sekolah khusus menjadi dilematis. Jika pengajaran bahasa Bali dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada lampiran Pergub Bali No. 20/2013 maka kompetensi yang diajarkan tidak sesuai kebutuhan pembelajaran (bahkan dalam hal tertentu mustahil dilakukan). Sebaliknya, jika guru berorientasi pada kebutuhan dan kondisi nyata pembelajar, maka melanggar pergub yang hingga saat ini masih berlaku. Misalnya, pada kompetensi dasar 4.1 untuk siswa kelas I SD tertulis membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. Bagaimana mengimplementasikan kompetensi dasar ini pada siswa kelas I SD SLB B (tunarungu)? Bagaimana menetapkan KKM? Bagaimana mengevaluasinya? Problematika yuridis ini dapat diatasi dengan merumuskan kembali kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran bahasa Bali untuk sekolah yang berkarakteristik khusus.

## 2.1 Problematika Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Bali

Teori nosional-fungsional menegaskan bahwa kebermaknaan pelajaran bahasa sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan si pembelajarnya (Parera, 1987; Purwo, 1990). Kebutuhan pembelajar sangat tergantung pada lingkungan pemakaian bahasa yang dipelajari. Oleh karena itu, pajaran dalam pelajaran bahasa seharusnya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya anak-anak. Mengacu prinsip umum ini, perlu ada tindakan nyata untuk mendeskripsi secara cermat kebutuhan pembelajaran bahasa Bali yang sesuai dengan karakteristik jenis dan jenjang sekolah. Pendeskripsian kebutuhan pembelajaran bahasa Bali dirasakan sangat penting, perlu, dan mendesak karena alokasi waktu yang tersedia sangat terbatas, yakni hanya 2 jam pelajaran/minggu serta karakteristik peserta didik dan sekolah yang sangat bervariasi, seperti yang tertera pada tabel 1. Fakta adanya keragaman variabel peserta didik dan lembaga persekolahan harus diselaraskan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajarannya. Misalnya, kepada siswa SMK rumpun teknik civil akan lebih bermakna jika diajarkan wacana, kalimat, *kosabasa* yang berkaitan dengan *asta kosala kosali*; sedangkan bagi siswa SMK rumpun kesehatan lebih bermakna jika diajarkan wacana, kalimat, *kosabasa* yang berkaitan dengan *usada dan taru premana*. Demikian pula, kepada siswa SMK rumpun dunia usaha lebih bermakna jika diajarkan wacana, kalimat, *kosabasa* yang berkaitan dengan *paceraken*. Kepada siswa SMK rumpun pertanian lebih bermakna jika diajarkan wacana, kalimat, dan *kosabasa* tentang *darma pamacul*. Pada madrasah mungkin lebih efektif jika fokus pada pengajaran bahasa Bali untuk kepentingan bersosialisasi-integrated dan/atau kesusastraan Bali bernuansa Islam.

Variabel pembeda lain yang perlu dipertimbangkan adalah jenis sekolah, seperti SLB. Karakteristik *'keluarbiasaan'* yang disematkan pada jenis sekolah ini memerlukan spesifikasi dalam rincian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Misalnya, kepada siswa kelas II SD SLB A tidak mungkin diajarkan aksara Bali (kompetensi inti 2 dan kompetensi dasar 2.1) karena tidak tersedia aksara Bali dengan sistem *braille*. Kepada siswa kelas X SMA SLB B pun tidak mungkin diajak melagukan pupuh (kompetensi inti 7 dan kompetensi dasar 7.1). Hal yang sama pun terjadi pada program paket belajar yang usia peserta didiknya telah melampaui usia wajib belajar. Peserta didik baru pada program paket A, misalnya, tidak bermanfaat jika diajarkan penggunaan bahasa Bali dalam *setting* bermain (kompetensi inti 2 dan kompetensi dasar 2.7). Jadi, ada problematika penerapan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertera pada lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013. Problematika ini perlu ditindaklanjuti dengan menyusun kembali kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran bahasa Bali sesuai dengan karakteristik sekolah dan peserta didik.

## 3. Penutup

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 patut diapresiasi karena merupakan payung hukum pengajaran bahasa Bali sebagai mutan lokal wajib. Namun demikian, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kembali secara cermat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Bali. Penyusunan dan pecermatan kembali KI dan

KD tersebut karena variabel peserta didik dan karakteristik sekolah sangat beragam. Kekurangtersediaan KI dan KD yang lebih spesifik merupakan problematika dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut.

11

#### Daftar Pustaka

- Baradja, M.F. 1990. *Kapita Selekta Pengajaran Bahasa*. Malang : Penerbit IKIP Malang.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Chaer, A. 2003. *Psikolinguistik : Kajian Teoretik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Parera, J.D. 1987. *Linguistik Edukasional*. Jakarta: Erlangga.
- Piaget, J. 1969. —Cognitive Developmentl. [cited 25 Maei 2004]. Available from : <http://www.psychiacomp.com/diadic/development-piaget.php>.
- Purwo, B. K. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sund, R. B. 1976. *Piaget for Educators : A Multimedia Program*. Ohio : Charles E. Merrill Publishing Company.
- 8
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Sumarsono. 2004. *Filsafat Bahasa*. Jakarta: Grasindo.
- Tolla, A. 1990. 'Tiga Versi Pandangan dalam Teori Pemerolehan Bahasa: Skinner, Chomsky, dan Krashen'. Dalam Nurhadi dan Roekhan (Ed). *Dimensi-Dimensi dalam Belajar bahasa Kedua*. Bandung: Sinar Baru.
- 5
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Aavailable from <http://www.jdih.baliprov.go.id>.
- Peraturan Gubernur Bali Tanggal 23 April 2013 Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Aavailable from <http://www.jdih.baliprov.go.id>.



# PROBLEMATIKA KURIKULUM GENERIK PELAJARAN BAHASA BALI

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
5	<a href="http://www.gatraguru.net">www.gatraguru.net</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://academypublication.com">academypublication.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://v3amilia.blogspot.com">v3amilia.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://areklampung.blogspot.com">areklampung.blogspot.com</a>	



Internet Source

1%

10

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

1%

11

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

# PROBLEMATIKA KURIKULUM GENERIK PELAJARAN BAHASA BALI

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---